



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL BAHARUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 519459

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.970.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1080 m²/540 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 387 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/200 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.900.000

1. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2020, HADIAH Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 822.634.640**F. HARTA LAINNYA** Rp. 143.000.000

Sub Total Rp. 4.195.034.640

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.195.034.640

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.